

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT
(PUGAR) DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPOTNO
SULAWESI SELATAN**

Hasri Aini Amran

28.1092

*Asdaf Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan*

Email: hasriainiamran@gmail.com

ABSTRACT

The People's Salt Business Development Program (PUGAR) as a national program was created with the aim of improving the welfare of the Indonesian people, especially salt farmers. The quality and quantity of people's salt is still below the standard due to the weather and facilities and infrastructure so that salt farmers have not been able to feel welfare in producing salt. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries established the People's Salt Business Development Program (PUGAR) to improve the quality and quantity of people's salt. This study aims to determine the implementation of the People's Salt Business Development Program (PUGAR) in Bangkala District, Jeneponto Regency. The author uses the implementation theory proposed by George C. Edward III, to analyze the implementation of the program. This type of research is a descriptive qualitative research with an inductive approach in order to analyze the problem correctly. Data was collected using interview techniques, and documentation. In this study, the findings obtained by the author are the implementation of the PUGAR program according to procedures from both policy makers and program implementers. However, the author finds that the legal basis for the PUGAR program is incompatible with the salt import policy. the quality and quantity of people's salt in Bangkala District after receiving assistance from the PUGAR program can increase. In order to improve the quality and quantity of people's salt without being hindered by the weather, it is recommended to build a salt house.

Keywords: Implementation, People's Salt Business Development Program

ABSTRAK

Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebagai program nasional dibuat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya petambak garam. Kualitas dan kuantitas garam rakyat masih di bawah standar yang diakibatkan salah satunya cuaca dan sarana dan prasarana sehingga petambak garam belum dapat merasakan kesejahteraan dalam memproduksi garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) guna meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto. Penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, untuk menganalisis pelaksanaan program. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar dapat menganalisis permasalahan secara tepat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini, temuan yang diperoleh penulis yaitu terlaksananya program PUGAR sesuai prosedur baik dari pembuat kebijakan maupun pelaksana program. Akan tetapi, penulis

mendapatkan ketidaksesuaian landasan hukum program PUGAR dengan kebijakan impor garam. kualitas dan kuantitas garam rakyat di Kecamatan Bangkala setelah memperoleh bantuan dari program PUGAR dapat meningkat. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat tanpa dihalangi oleh cuaca, disarankan untuk membangun rumah garam.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemaritiman yang dimiliki Indonesia penting untuk dimanfaatkan dan digunakan seluruhnya untuk kemajuan Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai berkenaan dengan laut maupun berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut serta di mana laut menjadi tumpuan utama bagi kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Dikatakan sebagai negara maritim masih jauh dari arti maritim itu sendiri karena pada kenyataannya pengelolaan sumber daya laut di Indonesia masih kurang. Salah satunya pada sektor produksi garam yang merupakan hasil dari penguapan air laut. Laut Indonesia yang sangat luas sangat dapat dimanfaatkan. Produksi garam menjadi salah satu isu nasional yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini. Negara-negara yang melakukan kegiatan impor garam ke Indonesia antara lain Australia, India, Tiongkok, Selandia Baru, Singapura, Jerman, dan Denmark.

Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa pada tahun 2010, sebanyak 2,08 juta ton garam impor yang diterima Indonesia. Jumlah ini sangat banyak dan dapat membuktikan bahwa hasil produksi garam Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan produksi garam rakyat dengan membuat kebijakan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Program ini telah dibuat sejak tahun 2011 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.41/Men/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

Program PUGAR berawal dari adanya permasalahan bahwa kondisi garam nasional yang produksinya belum memenuhi kebutuhan, kualitas garam yang dihasilkan rendah yang berakibat juga pada rendahnya pendapatan para petambak garam. Kesadaran pemerintah untuk mengelola sumber daya laut khususnya pada garam sudah mulai diperhatikan. Program PUGAR merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi desa.

Tujuan program PUGAR adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, menjamin kontinuitas dan membangun kelembagaan usaha garam rakyat. Empat tujuan ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa petambak garam cenderung masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi (terpisah-pisah) dengan pemanfaatan teknologi sederhana.

1.2. Permasalahan

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan Sulawesi dengan luas wilayahnya 45.717,48 km². Sulawesi Selatan merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia dan telah menerima program PUGAR sejak tahun 2011. Daerah di Sulawesi Selatan terdapat empat kabupaten yang menjadi penghasil garam yaitu Jeneponto, Takalar, Kepulauan Selayar, dan Pangkep.

Berikut jumlah produksi garam Indonesia tahun 2019 berdasarkan data hasil Laporan Kinerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan tahun 2019:

Tabel 1.1
Jumlah Produksi Garam Sulawesi Selatan (Ton) Tahun 2019

No	Kabupaten	Total
1	Pangkajene dan Kepulauan	29.015
2	Takalar	17.598
3	Jeneponto	65.025
4	Kepulauan Selayar	197
Jumlah		111.835

Sumber: Laporan Tahunan Kinerja KKP 2019

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memberikan kontribusi garam nasional untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi garam Sulawesi Selatan kurang lebih 150 ton/tahun atau sekitar 15% dari garam nasional yang tersebar di daerah yang menjadi lokasi penggaraman.

Penghasil garam di Sulawesi Selatan yang terbesar adalah Kabupaten Jeneponto dengan luas area tambak garam 57.580.000 m². Berdasarkan tabel di atas tercatat produksi garam Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 sebanyak 65.025ton di mana total produksi garam Sulawesi Selatan 111.835 ton. Tambak garam Kabupaten Jeneponto tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Tamalatea, dan Kecamatan Arungkeke. Adapun dua Kecamatan lainnya yang juga memiliki teluk yaitu Kecamatan Batang dan Potensi garam di Kecamatan Bangkala diprediksi mampu menjadi salah satu produk yang masih dilakoni oleh masyarakat sekitar. Sudah menjadi kebiasaan di wilayah Kecamatan Bangkala setiap musim kemarau akan memproduksi garam secara besar-besaran. Di Kecamatan Bangkala terdapat beberapa desa yang menjadikan garam sebagai mata pencaharian dikarenakan pembuatan garam yang bahan bakunya mudah ditemukan. Tambak garam di Kecamatan Bangkala tersebar di Desa Pallengu, Desa Punagaya, Kelurahan Bontorannu, dan Kelurahan Pantai Bahari. Luas tambak garam di Kecamatan Bangkala sebelum cek lapangan sebesar 4.747.200 m². Namun, hasil cek lapangan pada 7 titik, masih ada 3 titik yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga luas tambak garam menjadi 4.970.900 m² atau 62,55 % dari luas total sebaran tambak garam di Kabupaten Jeneponto. Dengan luas wilayah sebesar 121.820.000 m² (Mukri S, 2018).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petambak garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto seperti menurunnya hasil produksi yang disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu, status kepemilikan lahan, dan struktur pemasaran petambak garam di Kabupaten Jeneponto. Adanya program PUGAR nantinya dapat menjadikan para petambak garam di Jeneponto sejahtera. Pelaksanaan Program PUGAR di Kabupaten Jeneponto masih perlu untuk dikembangkan sehingga tujuan program untuk menghasilkan produk dan meningkatkan kualitas garam rakyat tercapai.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan program maupun konteks kegiatan produksi garam. Penelitian Lestina berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam di Kabupaten Jeneponto (Lestina, 2016), menemukan bahwa variabel modal, luas lahan, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi garam di Kabupaten Jeneponto sedangkan variabel tenaga kerja

dan lama kerja tidak signifikan terhadap produksi garam di Kabupaten Jeneponto. penelitian Trikobery, dkk (2017) menemukan usaha tambak garam di Desa Pengarengan menunjukkan bahwa kinerja finansial pada lahan pribadi dan sewa lahan menguntungkan dilihat dari pendapatan dan R/C rasio. Persentase GPM (53%) menunjukkan efektivitas manajemen yang sedang. Selain itu kriteria kelayakan yaitu NPV (bernilai positif) dan PP (kurang dari 1 tahun). Penelitian Yanti dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Petani Garam di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan (Yanti, 2018) menemukan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi petani garam, dan tenaga kerja tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap tingkat produksi petani garam, serta luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi petani garam di Kabupaten Jeneponto. Variasi naik turunnya produksi garam di Kabupaten Jeneponto Sebesar 99,3 % ditentukan oleh variabel modal, tenaga kerja dan luas lahan, sedangkan sisanya 0,7 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu penerima bantuan program PUGAR sejak tahun 2011. Haidawati, dkk (2012) menemukan bahwa pembentukan kelompok kurang efektif dengan nilai 1,84, tersalurnya BLM sangat efektif dengan nilai 4, pendampingan kelompok kurang efektif dengan nilai 1,36 dan program PUGAR sangat efektif dalam meningkatkan produksi garam dengan nilai 3,63, kurang efektif dalam meningkatkan kualitas garam dengan nilai 2, dan sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan dengan nilai 3,61.

Disimpulkan bahwa program PUGAR dengan nilai rata-rata dari akumulasi beberapa variabel output dan outcome sebesar 2,74 menunjukkan bahwa program PUGAR di Kabupaten Jeneponto efektif meskipun memiliki beberapa kelemahan maka perlu untuk dioptimalkan Penelitian Amanda dan Buchori berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (2014) terhadap Tingkat Keberdayaan Petani Garam di Kecamatan Kaliore (Amanda & Buchori, 2015) menemukan bahwa pelaksanaan program PUGAR tahun 2014 di Kecamatan Kaliore dinilai cukup berhasil oleh petani garam rakyat, sedangkan keberdayaan petani garam rakyat penerima program tersebut dinilai berdaya. Selanjutnya, hasil analisis korelasi menunjukkan adanya korelasi positif antara efektivitas dengan tingkat keberdayaan atau mempunyai hubungan searah, namun cenderung rendah.

Samahalnya dengan penelitian Utami menemukan bahwa pelaksanaan program PUGAR pada tahun 2015 khususnya dalam lingkup Kecamatan Kalianget dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi petambak garam menurut pandangan petambak garam rakyat yang menerima program tersebut. Hal ini dibuktikan oleh perolehan data yang telah diolah secara sistematis bahwa prosentase skor jawaban variabel efektivitas program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Penilaian dibuktikan dengan skor sebesar 76,76% dan termasuk dalam kategori efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III (Edward III, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program PUGAR di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepotno Sulawesi Selatan.

II. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar dapat mengumpulkan data, fakta yang nyata yang terjadi pada subjek yang teliti dengan mempelajari masalah yang terjadi dimasyarakat saat berada di lokasi penelitian, serta mampu menganalisis permasalahan secara tepat. Sehingga pada akhirnya memberikan pemahaman yang tepat kepada objek penelitian yang akan diteliti untuk. Selain itu, penulis dapat memahami dan mendalami secara menyeluruh objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu di lokasi magang. Penulis menggunakan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan kondisi yang alamiah, sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Secara operasional analisis data kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori), agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan (Bogdan & Biklen, 1992). Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, interpretasi dan verifikasi. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh George C. Edward III (Edward III, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PUGAR dapat diketahui terlaksana dan mencapai tujuannya, penulis melakukan dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi suatu pelaksanaan.

3.1. Komunikasi

Tabel 2.

Frekuensi Komunikasi

No.	Jenis Komunikasi	Alat yang Digunakan	Pihak yang Terlibat	Frekuensi Pertemuan
1.	Secara Langsung	Sosialisasi/ Pelatihan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Petuga PPB dan Tenaga Pendamping PUGAR, KUGAR	2 kali tiap tahun
		Rapat Internal	Dinas Kelautan dan Perikanan,	1 kali tiap tahun
		Rapat Eksternal	-	
2.	Secara Tidak Langsung	Surat	Dinas Kelautan dan Perikana	4 untuk tiap penerima bantuan
		Pengumuman	Dinas Kelautan dan Perikanan	2 kali tiap tahun

Sumber: diolah Penulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada Tabel 1. dapat dijelaskan bahwa pendamping, petugas PPB, maupun petambak garam menjalin komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang mereka bangun dengan baik dapat menghasilkan hasil yang baik pula dari pelaksanaan PUGAR.

Komunikasi menjadi salah satu variabel yang mendukung terlaksananya suatu pelaksanaan yang telah ditentukan. Para pelaksana program telah mengklaim tentang sosialisasi atau pelatihan yang telah dilakukan dan dapat tersampaikan kepada kelompok usaha garam rakyat. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik komunikasi secara langsung maupun tidak langsung bertujuan menghasilkan Program PUGAR sesuai yang diharapkan dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta kemampuan petambak garam yang lebih terampil. Pelaksanaan suatu program membutuhkan komunikasi yang efektif dari semua pihak yang terkait di dalamnya. Tujuan tersebut dapat tercapai salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi.

Dalam hasil wawancara penulis dengan informan yang menjadi Tenaga Pendamping PUGAR Kabupaten Jeneponto mengatakan bahwa “Program PUGAR dari pemerintah pusat yang

diteruskan kepada pemerintah daerah sudah cukup baik dan kami sebagai pendamping dan petugas PPB mengerti sebagai pelaksana program”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Analisis Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan yang merangkap sebagai Bendahara Ibu Aisyah Yacub, S.Pi.,M.Si mengatakan bahwa “Program PUGAR dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dijelaskan secara rinci kepada setiap daerah yang menerima program tersebut. Kami juga sebagai perantara pemerintah pusat untuk menjelaskan dan memberikan bantuan untuk kelompok usaha garam rakyat sehingga menghasilkan kualitas dan kuantitas garam yang baik”. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan komunikasi program PUGAR dari pihak kabupaten sudah cukup jelas dan dapat dimengerti oleh pelaksana langsung dan masyarakat pun telah paham akan adanya program tersebut.

3.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang penting sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berpotensi akan menghasilkan suatu kebijakan berjalan dengan baik. Hasil dari dokumentasi penulis pada saat penelitian mendapatkan data tentang pengurus yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Data Pengurus Program PUGAR

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Arfan, SH.,MM	S2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Arrahman, S.Pi	S1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Ibrahim, S.STPi.,M.Si	S2	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM)
4.	Aisyah Yacub, S.Pi.,M.Si	S2	Bendahara
5.	Ardi Sunardi Rahman, S.Pi	S1	Tenaga Pendamping PUGAR
6.	Hasriandi, S.Pi	S1	Penyuluh Perikanan/Petugas PPB
7.	Muh. Bakri, SE.,M.Si	S2	Ketua KUGAR Pabaeng-baeng
8.	Tajuddin	SMA	Ketua KUGAR Kassi Kebo
9.	Sulaeman	SMA	Ketua KUGAR Baji Pa'mai
10.	Bakri Sau	SMA	Ketua KUGAR Pallambarang
11.	Mansur, SE	S1	Ketua KUGAR Pantai Bahari
12.	Ibrahim Masi, SH	S1	Ketua KUGAR Baloboro'
13.	Tajuddin	SMA	Ketua KUGAR Paccelanga

Sumber: Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan, 2020

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bapak Arfan, SH.,MM tentang penerima bantuan PUGAR beliau menyatakan bahwa “Untuk keanggotaan KUGAR, penerima bantuan dalam program PUGAR, alhamdulillah setiap anggota kelompok bisa aktif dalam proses memproduksi garam. Di Kabupaten Jeneponto hanya empat kecamatan yang menjadi wilayah penggaraman, khususnya di Kecamatan Bangkala terdapat 20 KUGAR yang setiap kelompoknya terdiri 10 orang anggota”

Keanggotaan dalam penerima bantuan program PUGAR terdapat dalam Petunjuk Teknis PUGAR Tahun 2020 Bab III Penyaluran Bantuan huruf (B) persyaratan penerima bantuan yang berbunyi:

Calon penerima adalah koperasi dan/atau BUM Desa, dengan ketentuan:

1. Koperasi
 - a. Bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Koperasi aktif yang paling sedikit pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) satu kali dalam satu tahun terakhir dan aktif di bidang pergaraman yang dibuktikan dengan laporan RAT terakhir;
 - c. Anggotanya terdiri dari atas pemilik dan/atau pemilik-penggarap dan/atau penyewa-penggarap dan/atau penggarap-bagi hasil/*manthong* dan/atau Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR).
2. BUM Desa
 - a. Bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam rakyat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Dalam Musrenbangdes disepakati kegiatan terkait pergaraman yang dibuktikan dengan berita acara atau notulensi hasil Musrenbangdes.

Berdasarkan persyaratan penerima bantuan dari Program PUGAR kelompok yang dibentuk merupakan suatu koperasi ataupun kelompok BUM Desa yang telah disepakati. Semua penerimaan bantuan di Kecamatan Bangkala merupakan koperasi yang kemudian disebut sebagai Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Para petambak garam yang ada di Kecamatan Bangkala sebelum adanya Program PUGAR masih menggunakan cara yang tradisional, baik menggunakan penguapan total maupun cara perebusan air. Dengan perkembangan IPTEK dan dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat, pemerintah membuat Program PUGAR.

Melakukan sosialisasi, pelatihan dan/penyuluhan, hingga pendampingan dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan yang berkualitas. Ditemukannya berbagai perkembangan teknologi, Kecamatan Bangkala menggunakan alat isolator berupa plastik untuk menghasilkan garam yang memiliki kualitas yang baik dengan harga yang tinggi.

b. Sumber Daya Anggaran

Tabel 4.

Hasil Produksi Garam Kecamatan Bangkala 2017-2019

No.	Tahun	Bantuan (Rp)	Produksi (Ton)	Harga Garam (Rp/Ton)	Total (Rp)
1.	2017	399.800.000	9.208,84	1.000.000	9.208.840.000
2.	2018	499.000.000	18.093,75	650.000	11.760.937.500
3.	2019	582.772.000	33.582,01	500.000	16.791.005.000

Sumber: diolah Penulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan data yang ditabulasikan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan dengan hasil produksi garam di Kecamatan Bangkala mengalami peningkatan 83% dari tahun 2018 menghasilkan 18.093,75 ton tahun 2019 meningkat hingga 33.582,01 ton.

Dijelaskan bahwa dengan adanya program PUGAR dapat meningkatkan produksi garam, akan tetapi tidak dapat dipungkiri terjadinya penurunan harga garam sebesar 35% dari tahun 2017 dengan harga Rp.1.000.000/ton tahun 2018 menjadi Rp.650.000/ton. Terjadinya penurunan harga garam salah satunya diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk mengimpor garam yang sehingga produksi garam lokal kurang dilirik oleh masyarakat.

Tabel 5.
Impor garam Menurut Negara Asal Tahun 2017-2019

No.	Negara	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Australia	2.296.681,3	2.603.186,0	1.869.684,2
2.	India	251.590,1	227.925,6	719.550,4
3.	Tiongkok	269,2	899,7	568,0
4.	Selandia Baru	2.669,5	3.806,8	4.052,4
5.	Singapura	121,5	239,0	229,3
6.	Jerman	300,1	236,0	243,0
7.	Denmark	486,8	816,7	496,2
8.	Lainnya	704,7	1.967,6	573,8
9.	Jumlah	2.552.823,2	2.839.077,4	2.595.397,3

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam pada tahun 2017-2019 berturut-turut 2.552.823,2 ton, 2.839.077,4 ton, dan 2.595.397,3 ton. Jumlah impor garam tertinggi terjadi pada tahun 2018, hal ini juga yang menyebabkan penurunan harga jual garam rakyat di mana sebelumnya Rp.1.000.000/ton menjadi Rp.650.000/ton.

Neraca garam nasional menunjukkan pada tahun 2020, kebutuhan garam nasional 4.464.670 ton, sedangkan produksi garam nasional hanya 2.327.078 ton, sehingga terjadi ketimpangan antara jumlah produksi dengan kebutuhan garam sejumlah 2.137.592 ton. Kekurangan produksi garam nasional menyebabkan dikeluarkannya kebijakan untuk melakukan impor garam yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor.

c. Sumber Daya Fasilitas

Spesifikasi sarana dan/atau prasarana PUGAR, hal ini terlampir dalam Petunjuk Teknis PUGAR Tahun 2020, di antaranya

1. Gudang Garam Nasional kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) ton
2. *Learning and Business Center (LBC)*
3. Geomembran, menggunakan jenis LPDE (*Low Density Polyethylene*) dan/atau HDPE (*High Density Polyethylene*),
4. Alat uji mutu garam portable untuk menguji:
 - a. Kadar NaCl garam;
 - b. Kadar air garam;
 - c. Derajat putih garam.

Penulis juga mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan Ketua KUGAR Balloboro' Bapak Ibrahim Masi, SH mengatakan bahwa "Saya menjadi petambak garam sudah sangat lama, sebelum ada bantuan hingga sekarang. Selama ada bantuan ini sangat membantu kami dalam memproduksi garam, tidak ada yang namanya geomembran-geomembra selama melakukan proses pengkristalan, gudang kami juga kami sendiri yang buat". Senada dengan penyampaian Bapak Ibrahim Masi, SH, hal yang dirasakan oleh Ketua KUGAR Paccelanga Bapak Tajuddin, mengatakan bahwa "memang ada perubahan besar yang dibawa sama bantuan dari pusat ini, sudah terealisasi program bantuan ini kepada para petambak garam, khususnya saya sendiri gudang garam saya diperbaiki baru-baru ini".

Fasilitas lain yang diberikan dari bantuan program PUGAR adalah perbaikan maupun pembangunan Gudang Garam Rakyat hal ini bertujuan agar garam disimpan di tempat yang aman dan tidak mengurangi kadar garam yang telah dihasilkan. Berikut data Gudang Garam Rakyat (GGR) di Kecamatan Bangkala yang dibangun dari bantuan Program PUGAR.

Tabel 6.
Gudang Garam Rakyat (GGR) Kecamatan Bangkala

No.	Pemilik/Pengelola	Tahun	Kapasitas (Ton)	Alamat
1.	Muh. Bakri, SE.,M.Si	2015	40	Pabaeng-Baeng
2.	Tajuddin	2015	40	Kassi Kebo
3.	Sulaeman	2016	500	Baji Pamai
4.	Bakri Sau	2015	300	Pallambarang
5.	Mansur, SE	2015	40	Pantai Bahari
6.	Ibrahim Masi, SH	2015	40	Balobboro
7.	Tajuddin	2020	100	Peccelanga

Sumber: Tenaga Pendamping PUGAR

Gudang Garam Rakyat merupakan salah satu daftar dari bentuk bantuan yang diberikan kepada petambak garam, baik itu perbaikan maupun pembangunan gudang. Pembangunan dan perbaikan gudang dari bantuan program PUGAR setiap tahun dilakukan sehingga penyimpanan stok garam oleh petambak garam aman. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa gudang garam yang ada di Kecamatan Bangkala dari hasil bantuan program PUGAR sebanyak tujuh gudang, petambak garam yang menerima bantuan gudang garam yang terbaru oleh bapak Tajuddin dengan kapasitas garam 100 ton.

3.3. Disposisi

Penyaluran bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PUGAR Tahun 2020 Bab III tentang Penyaluran Bantuan. Berikut petunjuk penyaluran bantuan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kecamatan Bangkala:

1. Penetapan Penerima
 - a. Koperasi dan/atau BUM Desa diidentifikasi oleh dinas dibantu Tenaga Pendamping PUGAR dan/atau Penyuluh Perikanan dan/atau Penyuluh Perikanan Bantu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara identifikasi dan seleksi. Hasil odentifikasi selanjutnya diverifikasi oleh Tim Koordinasi dan Konsolidasi
 - b. Hasil verifikasi calon penerima bantuan sarana prasarana dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan diusulkan kepada dinas untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai koperasi dan/atau BUM Desa penerima bantuan
 - c. Kepala dinas kabupaten melaporkan penerima bantuan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi

2. Pengelolaan bantuan

Koperasi dan/atau BUM Desa penerima bantuan wajib mengelola dan/atau memanfaatkan bantuan tersebut sesuai tujuan serta tidak diperkenankan memidahkan ataupun menjualbelikan bantuan yang diterima.

3. Sanksi

Adapun jika penerima bantuan tidak dapat mengelola dan/atau memanfaatkan bantuan dengan baik maka dinas kabupaten dapat menghentikan izin usaha pengelolaannya dan bantuan dapat dialihkan kepada yang lain, yang bersedia menerima dan mengelola dengan baik bantuan tersebut dan disetujui direktur.

3.4. Struktur Birokrasi

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja program PUGAR selaku pelaksana secara langsung. Hal ini tercantum dalam Petunjuk Teknis PUGAR Tahun 2020 pada Bab II tentang Organisasi Pelaksanaan PUGAR, yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto selaku penerima program PUGAR memiliki kewenangan:
 - a. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam program PUGAR
 - b. Mengidentifikasi, menyeleksi dan memverifikasi serta menetapkan koperasi dan/atau BUM Desa sebagai penerima bantuan sarana dan prasarana PUGAR 2020;
 - c. Menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada koperasi dan/atau BUM Desa penerima bantuan dan mendampingi kegiatan operasionalnya;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan koperasi dan/atau BUM Desa dalam pelaksanaan program
 - e. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PUGAR kepada Direktur Jenderal
 - f. Melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan PUGAR
2. Tim Koordinasi dan Konsolidasi ini ditetapkan melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri atas sekurang-kurangnya unsur dinas dan dapat melibatkan unsur lain, seperti Dinas Koperasi, Kepala Desa/Lurah, Camat/Aparatur Kecamatan dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan. Tim Koordinasi dan Konsolidasi bertugas:
 - a. Melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi koperasi dan/atau BUM Desa calon penerima bantuan sarana dan prasarana PUGAR
 - b. Melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan PUGAR.
3. Tenaga Pendamping PUGAR dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran. Tenaga Pendamping PUGAR bertugas:
 - a. Melakukan pendampingan teknis produk garam;
 - b. Melakukan pendampingan kelembagaan penerima bantuan PUGAR;
 - c. Melakukan pendataan garam, baik *online* maupun *offline*;
 - d. Bersama dengan koperasi dan/atau BUM Desa melakukan fasilitas akses permodalan dan akses pasar bagi petambak garam;
 - e. Menyusun laporan bulanan yang meliputi aktifitas sebagaimana huruf (a) sampai huruf (d).

Jika semuanya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga program dapat terlaksana sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tau yang disebut dengan *Standard Operational Procedure* (SOP). Penulis melakukan wawancara dengan Tenaga Pendamping Bapak Ardi Sunardi Rahman, S.Pi, beliau mengatakan “untuk petambak garam yang ingin menjadi salah satu penerima bantuan dari program PUGAR ini maka harus membuat satu kelompok yang nantinya menjadi Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dan memiliki lahan tambak garam minimal 15Ha”

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Untuk mengukur kesejahteraan petani kita dapat melihat dari tingkat produksi yang dihasilkan. Dimana pengertian tingkat produksi itu sendiri merupakan banyaknya jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani dalam masa panen. Adapun pengertian produksi secara ekonomi adalah

penggabungan dari beberapa input dalam suatu proses untuk menghasilkan output yang disebut produksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi petani garam seperti modal dimana menurut Bawerk dalam Hafidh (2009), arti modal adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat, disebut kekayaan masyarakat. Sebagian kekayaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk memproduksi barang-barang baru dan inilah yang disebut modal masyarakat atau modal sosial. Kemudian tenaga kerja, tenaga kerja merupakan faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas berpikir yang maju seperti petani yang mampu mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama dalam menggunakan teknologi. Selain itu luas lahan dimana luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usahatani dan usaha pertanian.

Pelaksanaan program PUGAR tahun 2014 di Kecamatan Kaliore dinilai cukup berhasil oleh petani garam rakyat, sedangkan keberdayaan petani garam rakyat penerima program tersebut dinilai berdaya (Amanda & Buchori, 2015). Hal yang membuktikan bahwa efektivitas Program PUGAR hanya berpengaruh sebesar 12,3% terhadap keberdayaan petani garam adalah kegiatan usaha garam di Kabupaten Rembang salah satunya di Kecamatan Kaliore telah ada sejak masa kolonial Belanda tetap berjalan hingga tahun-tahun sebelum para petani garam belum menerima/mengenal program dari pemerintah, dan meskipun petani garam menghadapi permasalahan setiap waktunya. Tetap berjalannya kegiatan usaha garam ini menunjukkan bahwa petani garam mampu menjaga keberlanjutan usaha tradisional yang ada di daerah mereka, dimana adanya keberlanjutan juga merupakan salah satu aspek yang menunjukkan keberdayaan seseorang. Samahalnya dengan yang menjadi temuan penulis dalam penelitian ini, produksi garam rakyat di Kecamatan Bangkala naik hingga 83%, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai dan keberdayaan petambak garam dapat terberdaya.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis teori pelaksanaan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kecamatan Bangkala telah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang ada. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari tiap-tiap indikator yang ada. **Pertama**, komunikasi pelaksana dengan penerima bantuan aktif dan terarah, antara pendamping, penyuluh dan petambak garam. **Kedua**, sumber daya pendukung program PUGAR berjalan sesuai fungsinya untuk meningkatkan produksi garam, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. **Ketiga**, pemberian bantuan PUGAR telah sesuai dengan prosedur mulai identifikasi, seleksi, verifikasi, pengelolaan bantuan hingga sanksi. **Keempat**, para pelaksana program melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, baik pendamping PUGAR hingga petambak garam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan para petambak garam yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amanda dan Buchori. *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014 terhadap Tingkat Keberdayaan Petani Garam Rakyat di Kecamatan Kaliore*. Jurnal Teknik PWK Vo. 4 No. 2015. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro: Diponegoro

Amien Dhaneswara Al, & Adrienne Farah. 2020. *Tantangan dan Potensi Garam Nasional*. Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA). 2017. *Master Plan Pengembangan Rakyat Kabupaten Jeneponto*. Jeneponto

Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Jeneponto.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Bangkala Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Jeneponto.

Badan Pusat Statistik. *Impor Garam Menurut Negara Asal Utama 2010-2019*, dimuat pada tanggal 16 April 2020, diakses pada tanggal 25 Maret 2021 melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html>

Haidawati, dkk. (2015). *Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lau, Arifuddin. *Tingkatkan Kualitas Garam, DKP Jeneponto Gelar Sosialisasi PUGAR*, dimuat tanggal 8 Juli 2020, diakses pada tanggal 26 September 2020 melalui <https://rakyat.news/read/19314/tingkatkan-kualitas-garam-dkp-jeneponto-gelar-sosialisasi-pugar19314/>

Lestina. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Univeristas Islam Negeri Alauddin: Makassar

Primyastanto, Mimit. 2017. *Ilmu Kelautan dan Perikanan*. Malang: Intrans Publishing

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Trikobery, J. dkk. 2017. *Analisis Usaha Tambak garam di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*. Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. VIII No.2. Universitas Padjajaran. Bandung

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.41/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat.

Utami, A. Putri. *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dalam Meningkatkan Ekonomi Petambak Garam di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya

Yanti, Siti Desi. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Petani Garam di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.